

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PROGRAM INOVASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN KEWILAYAHAN: DAMPAK TERHADAP PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA BANDUNG

Oleh:

Mohammad Miftah

Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia

Email : moch.miftah@unpas.ac.id

Abstrak

Kemiskinan dan perempuan merupakan permasalahan yang tak kunjung dapat diselesaikan. Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayah sebagai upaya memberdayakan perempuan. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji implementasi program tersebut sebagai upaya memberdayakan perempuan agar mampu keluar dari kemiskinan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis berdasarkan interpretasi data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan telah memiliki akses untuk merancang program dan menyampaikan aspirasinya sama dengan laki-laki melalui organisasi PKK. Namun implementasi dari program lebih banyak dikeluarkan untuk pembangunan infrastruktur ketimbang program pemberdayaan bagi perempuan

Kata Kunci : Kemiskinan, Perempuan, Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayah

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi permasalahan yang belum terselesaikan sampai dengan saat ini terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kegagalan mengatasi kemiskinan dapat menyebabkan munculnya berbagai persoalan seperti masalah sosial, ekonomi dan politik ditengah masyarakat. lebih lanjut, terminologi kemiskinan menurut Supriatna (1997) dapat dikatakan sebagai kondisi serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Bastos (2009) lebih lanjut mengatakan bahwa kemiskinan juga berimplikasi kepada keretakan perempuan sebagai kelompok yang paling terancam akibat kemiskinan dibandingkan laki-laki. Berdasarkan kepada pernyataan tersebut, permasalahan kemiskinan erat kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi oleh perempuan.

Penelitian yang dilakukan oleh Indraswari (2009) mengatakan bahwa kaitannya perempuan dengan kemiskinan disebabkan oleh berbagai hal seperti terbatasnya kesempatan perempuan mendapatkan pekerjaan disektor publik, terbatasnya kapasitas perempuan dilihat dari pendidikan, kesehatan serta terbatasnya keamanan perempuan yang mengalaih kekerasan baik disektor publik ataupun domestik. Bastos (2009) menambahkan bahwa kemiskinan yang dihadapi oleh perempuan bukan disebabkan oleh kondisi alami namun ada kaitannya dengan keterbatasan terhadap proses ekonomi dan sosial, perbedaan mobilitas laki-laki dan perempuan serta ketidaksetaraan dalam alokasi, pembagian dan kontrol terhadap sumberdaya dilingkungan keluarga. Menurut Oko (2008) kondisi yang disebutkan diatas berdasarkan relasi kuasa yang

memicu adanya ketidakadilan dan ketidaksetaraan kondisi yang dirasakan perempuan sehingga menimbulkan konflik akibat dari struktur sosial yang tidak setara sehingga merepresentasikan kondisi kehidupan yang berbeda disebut sebagai permasalahan gender.

Secara harfiah, perempuan dan laki-laki memiliki perbedaan pada fungsi reproduksi sehingga perempuan perlu lebih diperhatikan dan dilindungi kebutuhannya. Pada prinsipnya, terdapat perbedaan-perbedaan kondisi yang dialami oleh perempuan dan laki-laki yang dipengaruhi oleh aspek biologis dan *socio-cultural* sehingga mempengaruhi kemampuan untuk merespon bencana (Ariyabandu, 2009; Achmad, 2021). Kondisi biologis yang dialami oleh perempuan berkaitan dengan kondisi menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, pengasuhan, periode menyusui, sehingga membutuhkan perawatan dan perlindungan yang lebih dibandingkan laki-laki dalam menghadapi bencana.

Sedangkan aspek *socio-cultural* berkaitan dengan konstruksi sosial *gender* dalam masyarakat dimana terdapat relasi hubungan yang tidak setara disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial, politik, budaya masyarakat, dominasi laki-laki, serta pengucilan terhadap pengetahuan dan tindakan perempuan yang tidak disadari dan tidak dihargai dalam bencana (Ariyabandu, 2009; Prawira et al., 2021). Murtakhmah (2013) menambahkan bahwa adanya diskriminasi, perbedaan peran, akses, partisipasi dan kontrol terhadap sumber daya yang dapat dilihat dari masih adanya pelabelan negatif, penomorduuan, marginalisasi ekonomi, beban ganda, dan kekerasan terhadap perempuan. Kondisi-kondisi demikian merupakan permasalahan *gender* yang

menyebabkan adanya ketidakadilan dan ketidaksamaan kondisi sehingga perempuan menjadi kelompok yang eksklusif dalam bencana alam.

Akatiga (2003) selanjutnya menjelaskan bahwa persoalan kemiskinan dan perempuan tidak hanya terkait ketidaksetaraan relasi *gender* antara laki-laki dengan perempuan, tetapi juga ketidaksetaraan relasi kekuasaan antara kelompok miskin dan kelompok yang lebih kuat. Permasalahan tersebut dihadapi oleh perempuan diberbagai *setting* salah satunya diwilayah perkotaan. Salah satu wilayah *urban* yang menghadapi permasalahan kemiskinan dan perempuan yaitu Kota Bandung.

Berdasarkan Data yang dikeluarkan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menunjukkan angka kemiskinan kota Bandung mencapai jumlah 79.573 keluarga dengan jumlah individu 304.939 jiwa atau 12,2% dari jumlah populasi dan sebanyak 66% diantaranya berusia produktif. Dari jumlah tersebut sebanyak 84.083 jiwa (21.555 keluarga) termasuk kategori sangat miskin, sebanyak 111.611 jiwa (29.009 keluarga) kategori miskin dan sebanyak 109.245 jiwa (29.009 keluarga) kategori hampir miskin. Dari 79.573 keluarga miskin Kota Bandung, terdapat 17.890 (22,5%) perempuan yang menjadi kepala keluarga. Artinya, perempuan yang menjadi kepala keluarga juga bertanggung jawab terhadap perekonomian keluarganya untuk terlepas dari kemiskinan. Oleh sebab itu, diperlukan adanya langkah-langkah pengentasan kemiskinan yang sistematis dan terencana untuk menyelesaikan permasalahan perempuan dan kemiskinan di Kota Bandung.

Program pengentasan kemiskinan terutama bagi perempuan telah banyak dilakukan diberbagai negara ataupun oleh *Non-Government Organization* (NGO) seperti Progresa Program di Meksiko dari tahun 1997-2000 yang memberikan bantuan bagi perempuan miskin untuk meningkatkan asupan nutrisinya, pendidikan bagi anak, dan kesehatannya (Luccisano, 2004; Sidiq&Maulida, 2021; Nurwati&Nandang, 2021). Sedangkan program dari NGO salah satunya dilakukan melalui program *Competency-Based Program for Disadvantaged women* yang berhasil meningkatkan taraf kehidupan dan kesehatan mental bagi ibu tunggal (Resnick, 1985). Dari kedua program tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua program berfokus kepada pemberdayaan dari *beneficiary*/perempuan untuk mampu meningkatkan taraf hidupnya sendiri.

Program yang berfokus untuk memberdayakan masyarakat menurut Ife (1995) berarti menyiapkan warga masyarakat sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menentukan masa depan, serta berpartisipasi dan mempunyai dampak dalam kehidupan komunitas tersebut. Pada konteks ini, pemberdayaan yang dilakukan ditujukan kepada perempuan untuk

meningkatkan kemampuan untuk menentukan pilihannya sendiri, mendapatkan akses politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pengintegrasian terhadap sumberdaya dan kesempatan (Kabeer, 1999; Achmad, 2021)

Di Kota Bandung pun terdapat program yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan agar mampu berdaya yaitu Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK). Konsep pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan merupakan proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada partisipasi dan swadaya masyarakat pada akhirnya diarahkan untuk memenuhi upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Program ini dilaksanakan di 30 kecamatan dengan cakupan merata 151 kelurahan atau seluruh kelurahan se-Kota Bandung. Untuk menjalankan program PIPPK, Pemerintah Kota Bandung memberikan anggaran sebesar Rp 100 juta ke setiap unsur kewilayahan yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM kelurahan), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK kelurahan), Rukun Warga (RW) dan Karang Taruna kelurahan. Esensi dari PIPPK adalah bagaimana warga secara aktif dan partisipatif dapat merancang sendiri program-program pembangunan di wilayahnya yang kemudian pembangunannya dibiayai oleh Pemerintah Kota Bandung melalui PIPPK.

Model partisipasi pembangunan dari bawah ke atas (*bottom up*) diharapkan dapat mengubah paradigma pembangunan di Kota Bandung, yang selama ini didominasi dari atas ke bawah (*top down*), sekaligus menjadi model pembangunan ideal. Berdasarkan kepada hal tersebut, Penelitian ini akan mengkaji Pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung melalui Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK). Tujuan dengan dilakukannya penelitian ini untuk menggambarkan program yang dilakukan dalam upaya memberdayakan perempuan miskin di Kota Bandung.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif digunakan dalam memahami sebuah fenomena pemberdayaan terhadap perempuan berdasarkan gambaran secara menyeluruh yang menjelaskan tentang padangan informan secara terperinci.

Guna memperoleh informasi yang sesuai yang diharapkan dari penelitian ini, maka peneliti memilih informan yang mengetahui secara langsung ataupun terlibat dengan penelitian ini. teknik pengambilan data dilakukan dengan menggunakan analisis data primer dengan cara *deep interview* dan data sekunder dari sumber-sumber literatur seperti Peraturan daerah, media cetak, dan lain sebagainya. Penelitian ini dilakukan dengan cara melihat proses

implementasi dari Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan dari mulai tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) adalah Program pembangunan yang inovatif melalui pendekatan Pemberdayaan Masyarakat yang dikehendaki dan direncanakan secara kolaboratif untuk mengakselerasi percepatan pembangunan di kewilayahan. Adapun maksud dan tujuan dari program ini meningkatkan tugas, peran dan fungsi aparatur kewilayahan beserta seluruh *stakeholder* Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan untuk mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat salah satunya untuk pemberdayaan perempuan.

Sasaran dari Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) awalnya hanya untuk RW namun seiring perkembangannya juga diberikan kepada lembaga pembina kesejahteraan keluarga (PKK) kelurahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Karang Taruna Kelurahan. Gilbert (1993) bahwa sasaran yang dimaksudkan dalam sebuah program disebut sebagai *basic allocation* yang berarti bagi siapa program tersebut diberikan. Pada masyarakat Kota Bandung, Kelompok PKK biasanya dikelola dan dijalankan oleh perempuan-perempuan di wilayah setempat artinya juga mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses kepada Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK).

Menurut Gilbert (1993) bahwa manfaat dari program kebijakan dapat berbentuk dana tunai atau barang/jasa. Namun demikian, jenis manfaat lain yang biasanya didistribusikan melalui lembaga kesejahteraan sosial, seperti kewenangan, voucher, dan peluang yang memungkinkan berbagai kewenangan diserahkan kepada penerima manfaat sebagai tingkatan yang lebih rendah. PIPPK sebagai salah satu kegiatan yang terdapat di kelurahan, memberikan manfaat dengan cara memberikan dana tunai atau dalam bentuk barang/jasa dengan pengelolaan sepenuhnya menjadi kewenangan penerima program. Tentu saja dengan tetap pengawasan aparat kelurahan terutama lurah sebagai kuasa pengguna anggaran. Selain pengawasan tingkat kelurahan, PIPPK juga mendapat pengawasan dalam bentuk kebijakan yang dilakukan kecamatan karena kecamatan merupakan tim pengarah PIPPK. *Strategies of Delivery* Program PIPPK merupakan suatu sistem yang diawali dengan perencanaan yang diusulkan berdasarkan kebutuhan setiap tahun oleh pelaksana PIPPK dan dilaksanakan oleh aparatur kelurahan dengan tetap berpedoman pada usulan semula.

Perencanaan

Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) berawal dari perencanaan para pelaku kegiatan. Diawali dengan usulan tiap Rukun Warga (RW) dan Lembaga Ketahanan Kewilayahan (PKK, LPM dan Karang Taruna) melalui musyawarah pembangunan tingkat kelurahan, yang dilanjutkan musyawarah pembangunan tingkat kecamatan dan musyawarah pembangunan tingkat kota. Pada setiap tingkatan musyawarah usulan tersebut dibahas bersama-sama antara pengusul dengan pemerintahan setempat. Perempuan di setiap wilayah memiliki kesempatan yang sama untuk mengusulkan program-program dalam upaya meningkatkan kapasitas. Berdasarkan temuan dilapangan, keterlibatan perempuan dalam perencanaan seringkali melalui lembaga PKK Kelurahan. Berdasarkan temuan dilapangan untuk Lingkup PKK tidak dijelaskan secara rinci prosentase fokus alokasinya, hanya disebutkan bahwa PIPPK untuk PKK dialokasikan untuk kegiatan PKK tingkat kelurahan 50%, kegiatan PKK tingkat kecamatan 30% dan kegiatan PKK tingkat kota 20%.

Namun, tidak semua perempuan mengetahui dan terlibat dalam perencanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK). Hal tersebut dapat dilihat dari minimnya aspirasi perempuan yang diimplementasikan dalam Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) yang berfokus kepada infrastruktur.

Tahap selanjutnya, setelah usulan direkapitulasi oleh pemerintah setempat, usulan tersebut dibahas legislatif dan menghasilkan dokumen pelaksanaan anggaran. Sistem lain dalam PIPPK adalah sistem administrasi keuangan pemerintah. Dana PIPPK seluruhnya bersumber dari APBD Kota Bandung, oleh karena itu proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban wajib mengikuti sistem yang berlaku dalam sistem keuangan pemerintah seperti proses pengadaan barang dan jasa, proses pencairan dana, proses penggunaan dana sampai proses pertanggungjawaban. Auditnya pun sama seperti audit yang dilakukan pada kegiatan pemerintah lainnya.

Pelaksanaan

Selanjutnya, tahap pelaksanaan yaitu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup kegiatan dan daftar penggunaan anggaran kelurahan, dan yang terakhir adalah kegiatan monitoring dan evaluasi seperti penyusunan laporan dan pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan wawancara praobservasi dengan Kepala bagian Pemerintahan Umum Kota Bandung diketahui bahwa dari jumlah 30 kecamatan di Kota Bandung yang di dalamnya terdiri dari 151 kelurahan, sudah melaksanakan secara serentak sejak tahun 2015, dan difokuskan pada perbaikan infrastruktur yaitu mencapai 40%, kebersihan 20%, sosial ekonomi 20%, dan pemberdayaan 20%.

Kegiatan yang difokuskan pada PIPPK

berkaitan dengan infrastruktur skala kecil kewilayahan, kebersihan dan penghijauan wilayah, peningkatan kemampuan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah, hingga penguatan kelembagaan pada lembaga kemasyarakatan kelurahan dimasing-masing wilayah. Kegiatan tersebut tentunya ditujukan untuk mengakselerasi pemerataan pembangunan disetiap wilayah Kota Bandung dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Tabel 5.6
Fokus Kegiatan PIPPK Tahun 2015-2017

No	Fokus Kegiatan	Tahun		
		2015	2016	2017
1	Infrastruktur	35,61 %	52,14 %	54,56 %
2	Kebersihan dan penghijauan	43,44 %	10,72 %	8,36 %
3	Sosial dan Ekonomi	5,08 %	7,08 %	12,31 %
4	Penguatan Kelembagaan	15,87 %	30,10 %	24,77 %

(Sumber: Data Bagian Pemerintahan 2017, Dokumen Selayang Pandang PIPPK)

Fokus kegiatan tersebut menjadi pemantik bagi masyarakat untuk mengelola wilayahnya dengan melakukan berbagai inovasi. Pada fokus kegiatan infrastruktur di beberapa wilayah berinovasi membuat penerangan jalan lingkungan dan merehab kantor lembaga kemasyarakatan, pada tahun 2016 terdapat 960 unit kantor yang mampu direhab dan 669 titik penerangan jalan lingkungan yang dihasilkan melalui PIPPK. Kemudian pada fokus kebersihan dan penghijauan di beberapa wilayah berinovasi dengan mengadakan kegiatan pekan kebersihan serta menciptakan ruang terbuka hijau di tingkat kelurahan melalui pemeliharaan taman-taman kelurahan, pada tahun 2016 terdapat 51 unit taman sekaligus lahan *urban farming* yang dilakukan melalui program PIPPK. Selanjutnya pada focus social dan ekonomi di beberapa wilayah berinovasi dengan melakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat salah satunya pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat. Terakhir, pada penguatan kelembagaan di beberapa wilayah berinovasi dengan membuat bagan struktur lembaga kemasyarakatan serta perlengkapan lembaga seperti seragam lembaga kemasyarakatan.

Berdasarkan data-data tersebut diketahui bahwa penganggaran Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) masih berfokus kepada infrastruktur. Maka dari sisi pemberdayaan perempuan masih belum spesifik dirasakan manfaatnya untuk perempuan dan pengentasan kemiskinan kota. Hal tersebut tidak sejalan dengan yang disampaikan oleh Kusnaka dalam Hikmat (2001) bahwa pemberdayaan masyarakat tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi rakyat, tetapi juga harkat martabat, rasa percaya diri dan harga diri serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat. Pemberdayaan sebagai konsep sosial budaya yang implementatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat, tidak saja menumbuhkembangkan nilai tambah ekonomi tetapi juga nilai tambah sosial budaya.

Maka dari sudut pandang partisipasi masyarakat terhadap program PIPPK ini belum optimal. Sebab PIPPK masih hanya terfokus di RW, atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), tidak sampai ke masyarakat langsung. Dengan demikian PIPPK yang diharapkan dapat memberdayakan kewilayahan bisa dikatakan belum menuju ke arah pemberdayaan masyarakat, sebab program yang bertujuan untuk membangun dan memberdayakan masyarakat dapat dicapai secara optimal apabila ditempuh melalui peran serta dan partisipasi aktif yang luas dari seluruh masyarakat mulai dari tingkat paling bawah terutama dalam pengambilan keputusan dalam memecahkan berbagai permasalahan melalui metode Pemberdayaan Masyarakat.

Namun jika melihat dari hasil penjelasan Peraturan Walikota Bandung Nomor 436 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 281 Tahun 2015, dimana dalam perwal ini merupakan salah satu janji Walikota Bandung mengenai Inovasi daerah, dimana dalam pembangunan di Kota Bandung peran serta masyarakat dalam pembangunan kewilayahannya dilibatsertakan.

Maka dari sisi peran serta masyarakat masih kurang. Namun jika ditilik lebih jauh dari perwal tersebut, menyatakan bahwa maksud dari program inovasi ini untuk meningkatkan tugas, peran, dan fungsi aparat kewilayahan beserta seluruh stakeholder lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan melalui pengembangan pemberdayaan masyarakat, sehingga perencanaan pembangunan kewilayahan didasarkan pada input dari lembaga masyarakat seperti RW, Karang taruna, PKK dan LPM, dimana programnya tersebut akan dititipkan di Kelurahan. Dengan adanya PIPPK, difokuskan pada semangat kebersamaan, desentralisasi, dan mendorong kemampuan *leadership* setiap aparat kewilayahan.

Maka jelas bahwa PIPPK bukan ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat seperti yang dipahami selama ini. Bahwa Jika ada suatu program yang bertujuan untuk membangun dan memberdayakan masyarakat dapat dicapai secara optimal apabila ditempuh melalui peran serta dan partisipasi aktif yang luas dari seluruh masyarakat mulai dari tingkat paling bawah terutama dalam pengambilan keputusan dalam memecahkan berbagai permasalahan melalui metode Pemberdayaan Masyarakat. Dalam PIPPK justru kelembagaan yang dikuatkan untuk memiliki keterlibatan dalam membangun Kota Bandung.

4. KESIMPULAN

Selama kurun waktu 2015-2017 pelaksanaan program PIPPK dalam program sudah menyerap anggaran yang cukup besar tetapi sasaran program masih didominasi kegiatan infrastruktur. Hal ini disebabkan karena masyarakat menganggap bahwa

pembangunan infrastruktur relatif lebih nyata secara visual dan mudah untuk diukur, selain itu infrastruktur dianggap sangat mendesak untuk mendapat perhatian. Berbeda dengan pembangunan non fisik seperti pemberdayaan perempuan, pembangunan pemberdayaan perempuan dianggap lebih sulit dan tidak dianggap sebagai permasalahan yang perlu segera mendapat penanganan.

Sesuai Peraturan Walikota Nomor 281 tahun 2015, konsep PIPPK merupakan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat karena sebagian masyarakat ikut terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya. Namun dalam tataran implementasinya di masyarakat masih didominasi oleh segelintir anggota masyarakat yang aktif berkegiatan di tingkat kelurahan, sehingga partisipasi masyarakat secara menyeluruh masih perlu mendapat perhatian dari pemerintah kewilayahan.

Program pemberdayaan perempuan yang dilakukan PKK kelurahan sebenarnya ada dan dilakukan oleh kader-kader PKK tetapi masih sangat minim dan tanpa disertai konsep yang jelas. Oleh karena itu program pemberdayaan perempuan melalui PIPPK masih dirasakan belum optimal dan hanya bersifat semu.

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan melalui PIPPK disebabkan karena minimnya sosialisasi program PIPPK kepada masyarakat. Faktor lain adalah penyebab rendahnya partisipasi dalam pemberdayaan perempuan adalah belum adanya kebijakan penyelenggaraan bimbingan teknis kepada aparat kewilayahan secara berkesinambungan.

Untuk mengoptimalkan program pemberdayaan perempuan melalui PIPPK sesuai dengan permasalahan diatas dapat kami sarankan sebagai berikut :

1. Perlu peningkatan sosialisasi program pemberdayaan perempuan melalui PIPPK sejak penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi program
2. Perlu adanya pendampingan program PIPPK karena tidak seluruh masyarakat khususnya perempuan yang menjadi sasaran penerima program memiliki pengetahuan yang memadai terhadap program yang digulirkan
3. Perlu adanya peningkatan kapasitas aparat kewilayahan melalui bimbingan teknis yang berkesinambungan terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan program sehingga dapat mencegah potensi pelanggaran

5. DAFTAR PUSTAKA

Achmad, W. (2021). Monitoring dan Evaluasi Program Corporate Social Responsibility Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 1(2), 29-37.

Achmad, W. (2021). Citizen and Netizen Society: The Meaning of Social Change From a

Technology Point of View. *Jurnal Mantik*, 5(3), 1564-1570.

Adi, Isbandi Rukminto. 2012. *Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.) h. 211

Akatiga. 2003. Perempuan, Keiskinan dan Pengambilan Keputusan. *Jurnal Analisis Sosial*, Vol 8:2

Arriyabandu, M. 2009. Sex, Gender and Gender Relations in Disasters. chapter in Enarson (2009) *Women, Gender and Disaster*. SAGE Publications India Pvt Ltd ; New Delhi

Badan Pusat Statistik. 2017. *Profil Kemiskinan di Indonesia September 2017 No.5/01/th.XXI,2 Januari 2018*. Jakarta. BPS.

Bastos, Amelia., Casa, Sara F., Nunes, Francisco., Pereirinha, Jose. 2009. Women and Poverty : A Gender-Sensitive Approach. *Journal of Socio-Economics*, Vol 38, pg 764-778.

Christanto, Teddy. 2013. Determinan dan Karakteristik Kemiskinan di Provinsi Riau. Volume VII, No 2, Desember 2013 ISSN : 1978 – 3612.

Gilbert, N. Specht, H. Terrell, P. 1993. *Dimension of Social Welfare Policy*, A Simon & Scuster Company, New Jersey

Goetz, Anne Marie. 2007. Gender justice, citizenship and entitlements: core concepts, central debates and new directions for research. In Mukhopadhyay, Maitrayee and Navsharan Singh (eds). *Gender Justice, Citizenship and Development*. New Delhi : Zubaan, an imprint of Kali for Women ; Ottawa : International Development Research Centre.

Hogen, Christine. 2000. *Facilitating Empowerment: a Handbook for Facilitators, Trainers and individuals*. (London: Kogan Page Limited) h.13

Ife, Jim. 1995. *Community development: Creating community alternatives-vision, analysis and practice*. Australia: Longman Pty Ltd

Indraswari. 2009. Perempuan dan Kemiskinan. *Jurnal Analisis Sosial* Vol 14:2, pg 40-52.

Kabeer, N. 1999. Resources, agency, achievements: Reflections on the measurement of women's empowerment. *Development and Change*, 30, 435-464

Luccisano, Lucy. 2004. *Mexico's Progres Program (1997-2000) : An Example of Neo-Liberal Poverty Alleviation Program Concerned with Gender, human Capital Development, Responsibility and Chocie. Poverty and Inequality in teh Latin American – U-S Borderlands*.

Murtakhamah, Titin. 2013. Peningnya Pengarusutamaan Gender dalam program pengurangan Resiko Bencana. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 2:1, pg 38: 53

- Nurwati, N., & Mulyana, N. (2021). Resiliensi Keluarga Single Parent dengan Anak Sikzofrenia. *MEDIA BINA ILMIAH*, 14(8), 3061-3064.
- Okon, Juliette. 2008. *Understanding and Using Theory in Social Work*. Learning Matters Ltd. British
- Prawira W, R., Maulida, H., & Achmad, W. (2021). Narrating the Implementation of Social Welfare Community Program. *Review of International Geographical Education Online*, 11(5), 228-235.
- Resnick, Gary. 1985. *The Short and Long Term Impac of Competency-Based Program for Disadvantaged Women*. *Journal of Social Service Resarch*, Vol 7(4) pg, 37-49
- Sidiq, R. S. S. (2020). Model Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Reformasi*, 10(2), 217-227.
- Sidiq, R. S. S., & Achmad, R. W. W. (2020). Gender aspects in remote indigenous community empowerment program in Indonesia. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(6), 2104–2109. <https://doi.org/10.5373/JARDCS/V12I6/S20201172>
- Sidiq, R. S. S., & Maulida, H. (2021). Exploring Health Disparities in Indigenous Akit Tribal Community in Riau Province. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 37(1).
- Sidiq, R. S. S., Jalil, A., & Achmad, R. W. W. (2021). Virtual World Solidarity: How Social Solidarity is Built on the Crowdfunding Platform Kitabisa. com. *Webology*, 18(1), 192-202.
- Supriatna, Tjahya. 1997. *Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*. Bandung. Humaniora Utama
- <http://data.bandung.go.id/dataset/data-kemiskinan-kota-bandung-berdasarkan-kelurahan>